



Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai Tahun 2021

Tahun
2021





BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR **694** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

33. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46);
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenaan dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai telah selesai disusun.

Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ini melibatkan berbagai pihak olehnya itu ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya tak lupa kami haturkan.

Semoga penyusunan RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semua, terutama bagi instansi terkait. Semoga Allah SWT meridhai segala langkah-langkah kita. Amin.

Sinjai,

2020



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai,

Drs. YUHADI SAMAD, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB IV. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Sinjai	8
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai.....	23
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	26
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sinjai.....	39
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2021. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu satu tahun ke depan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 93);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 129);
 - t. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25).

- u. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46);
- v. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk menjabarkan RKPD Tahun 2021, terutama yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2021 dan sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai, Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2018	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	Urusan Wajib														
1	02	12	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	02	12	01	01	Program Pelayanan Perkantoran	Outcome : Cakupan pemenuhan Pelayanan perkantoran	100%	0%	100%	100%	100%	100%			
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	60 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40.00

1	02	12	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	18	unit	0	Unit	15	Unit	15	Unit	100	15	Unit	30	Unit	166.67
1	02	12	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00
1	02	12	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00
1	02	12	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00
1	02	12	01	01	19	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi Kesekretariatan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00
1	02	12	01	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	60	Dokumen	0	Bulan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	24	Dokumen	40.00
1	02	12	01	01	022	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00

1	02	12	01	02		Program Pelaporan kinerja	Cakupan Pemenuhan pelaporan kinerja	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	12	01	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00	
1	02	12	01	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	30 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	6 Dokumen	14 Dokumen	46.67	
1	02	12	01	02		Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	LPM =	80	80	80	80	80	80	80	100.00
								POK JA POS YAN DU DES A / KEL.	337	337	337	337	337	337	337	337
1	02	12	01	02	008	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	8 Lembaga	0 Lembaga	8 BKAD	8 BKAD	100	8 BKAD	8 BKAD	100.00	
1	02	12	01	02	010	Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	64 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0	16 Desa	16 Desa	25.00	

1	02	12	01	02	011	Workshop Penguatan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang mengikuti Workshop	640 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	160 Orang	160 Orang	25.00
1	02	12	01	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
1	02	12	01	16	008	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dibina	13 Lembaga	0 Lembaga	13 LKM	13 LKM	100	13 LKM	26 LKM	200.00
1	02	12	01	16	010	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	0 BUMDesa	67 BUMDesa	67 BUMDesa	100	67 BUMDesa	134 BUMDesa	200.00
1	02	12	01	16	012	Monitoring dan identifikasi terhadap sarana dan prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi	67 Desa	0 Desa	67 Desa	67 Desa	100	0 Desa	67 Desa	100.00
1	02	12	01	16	013	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek	0 Posyantek	9 Posyantek	9 Posyantek	100	9 Posyantek	9 Posyantek	100.00
1	02	12	01	16	015	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Desa yang mempunyai potensi kawasan pedesaan	67 Desa	0 Desa	67 Desa	67 Desa	100	67 Desa	67 Desa	100.00
1	02	12	01	16	016	Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi	1 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah	0	1 Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah	100.00

1	02	12	01	17		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	46.87 %	0 %	23 %	23 %	23	23 %	23 %	49.07
1	02	12	01	17	005	Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aparat Desa/Kelurahan yang mengikuti Workshop peningkatan aparatur dalam pengelolaan swadaya masyarakat dan gotong royong masyarakat	80 Orang	0 Orang	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	160 Orang	200.00
1	02	12	01	17	007	Pembinaan Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah perangkat Desa (Kepala Dusun/Lingkungan) yang mengikuti Kegiatan Pembinaan	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	80 Orang	80 Orang	100.00
1	02	12	01	19		Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Outcome : Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100.00

1	02	12	01	19	006	Pelayanan administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	60	Bulan	0	Keg.	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	40.00
1	02	12	01	19	007	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)	5	Keg.	0	Keg.	1	Keg.	1	Keg.	100	1	Keg.	2	Keg.	40.00
1	02	12	01	19	009	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	2,000	Kelompok	0	Kelompok	9	Kelompok	9	Kelompok	100	9	Kelompok	18	Kelompok	0.90
1	02	12	01	19	011	Rapat koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	15	Kali	0	Kali	3	Kali	3	Kali	100	4	Kali	7	Kali	46.67
1	02	12	01	19	012	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	15	Kali	0	Kali	3	Kali	3	Kali	100	9	Kecamatan, Desa/Kelurahan	12	Kali	80.00
1	02	12	01	19	015	Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang dibina	60	Orang	0	Orang	90	Orang	90	Orang	100	89	Orang	179	Orang	298.33
1	02	12	01	19	017	Biimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan POSYANDU (POKJA II)	Jumlah Kelompok BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	18	Orang	0	Orang	80	Orang	80	Orang	100	0	Orang	80	Orang	444.44

1	02	12	01	19	018	Workshop Peningkatan Kapasitas Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD	Jumlah Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD yang mengikuti Workshop	554	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	554	Orang	554	Orang	100.00
1	02	12	01	19	019	Pembinaan dan Pengembangan UP2K dan Koperasi	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	20	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	20	Kelompok	20	Kelompok	100.00
1	02	12	01	19	023	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit (Lanjutan) (POKJA II)	Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit	340	Orang	0	Orang	40	Orang	40	Orang	100	0	Orang	40	Orang	11.76
1	02	12	01	19	024	Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pekarangan yang kreatif dan berinovasi (Pangan) (POKJA III)	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	480	Orang	0	Orang	90	Orang	90	Orang	100	0	Orang	90	Orang	18.75
1	02	12	01	19	026	Pembinaan Perawatan Jenazah (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan Perawatan Jenazah	60	Orang	0	Orang	89	Orang	89	Orang	100	603	Orang	692	Orang	1153.33
1	02	12	01	19	031	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti pembinaan	688	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	688	Orang	688	Orang	100.00
1	02	12	01	19	032	Monitoring dan evaluasi kesehatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, anak balita dan Prasekolah	Jumlah wilayah yang dimonitoring kesehatan ibu dan anak	9	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	9	Kecamatan	9	Kecamatan	100.00

1	02	12	01	19	038	Workshop Menu B2SA	Jumlah Kader PKK yang dibina	89	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	89	Orang	89	Orang	100.00
1	02	12	01	19	040	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan pengelolaan Sampah Rumah Tangga	152	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	152	Orang	152	Orang	100.00
1	02	12	01	19	043	Peningkatan Kapasitas SDM Kader PKK Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang dibina	80	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	80	Orang	80	Orang	100.00
1	02	12	01	20		Program Pendorongan swadaya Masyarakat Dalam menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi	Outcome : Penurunan Angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi balita dan cakupan imunisasi	<2/40	AKI	0		<6/4050	<6/4050	<6/4050	<6/4050	<6/4050	<6/4050	0			
								<1/1000	AKB	0		<5/1000	<5/1000	<5/1000	<5/1000	<5/1000	<5/1000	0			
								20	% Stunting	0	%	43	%	43	%	43	43	%	43	%	215
								92	% IDL	0	%	92	%	92	%	92	92	%	92	%	100
1	02	12	01	20	001	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti pembinaan	688	Orang	0	Orang	688	Orang	688	Orang	100	0	Orang	688	Orang	100.00
1	02	12	01	20	002	Monitoring dan evaluasi kesehatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, anak balita dan Prasekolah	Jumlah wilayah yang dimonitoring kesehatan ibu dan anak	8	Kec.	0	Kec.	9	Kec.	9	Kec.	100	0	Kec.	9	Kec.	112.50
1	02	12	01	20	003	Sosialisasi penyakit Menular (TB-HIV) dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kader PKK yang memahami pencegahan penyakit menular dan tidak menular	2,000	Orang	0	Orang	200	Orang	200	Orang	100	0	Orang	200	Orang	10.00

1	02	12	01	21		Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Posyantek Aktif	9 Posyantek	0 Posyantek	9 Posyantek	9 Posyantek	9	0 Posyantek	9 Posyantek	100.00
1	02	12	01	21	001	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek	0 Posyantek	9 Posyantek	9 Posyantek	100	0 Posyantek	9 Posyantek	100.00
1	02	12	01	22		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	67 Desa	0 Desa	67 Desa	67 Desa	67	67 Desa	67 Desa	100.00
1	02	12	01	22	001	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	67 Desa	0 Desa	8 Desa	8 Desa	100	9 Desa	17 Desa	25.37
1	02	12	01	22	002	Rakernis Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Jumlah Anggota Profil Desa / Kelurahan yang mengikuti Rakernis	80 Orang	0 Orang	80 Orang	80 Orang	100	0 Orang	80 Orang	100.00
1	02	12	01	22	003	Penyusunan Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa	Penyusunan Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa	1 Perbup	0 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100	0 Perbup	1 Perbup	100.00
1	02	12	01	22	004	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	0 Desa	67 Desa	67 Desa	100	0 Desa	67 Desa	100.00

1	02	12	01	22	005	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	67	laporan	0	laporan	67	laporan	67	laporan	100	67	Laporan	134	laporan	200.00
1	02	12	01	22	006	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	5	Perbup	0	Perbup	1	Perbup	1	Perbup		1	Perbup	2	Perbup	40.00
							Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa	335	Rekomendasi	0	Rekomendasi	67	Rekomendasi	67	Rekomendasi		67	Rekomendasi	134	Rekomendasi	40.00
							Laporan pertanggungjawaban yang dievaluasi	1340	laporan	0	laporan	268	laporan	268	laporan		268	laporan	536	laporan	40.00
							Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klarifikasi Peraturan Desa.	670	Dokumen / Rekomendasi	0	Dokumen / Rekomendasi	134	Dokumen / Rekomendasi	134	Dokumen / Rekomendasi	100	0	Dokumen / Rekomendasi	134	Dokumen / Rekomendasi	20.00
1	02	12	01	22	013	Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilantika dan diambil sumpahnya	497	Orang	0	Orang	497	Orang	497	Orang	100	0	Orang	497	Orang	100.00

1	02	12	01	22	014	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa yang DiBimtek Jumlah Perangkat Desa yang dibimtek	268	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	268	Orang	268	Orang	100.00
1	02	12	01	22	016	Monitoring Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang dimonitoring	80	Desa/ Kelurahan	0	Desa/ Kelurahan	0	Desa/ Kelurahan	0	Desa/ Kelurahan	0	80	Desa/ Kelurahan	80	Desa/ Kelurahan	100.00
1	02	12	01	22	017	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	4	Peraturan Bupati	0	Peraturan Bupati	0	Peraturan Bupati	0	Peraturan Bupati	0	4	Peraturan Bupati	4	Peraturan Bupati	100.00
1	02	12	01	22	020	Pembekalan Teknis dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembekalan teknis dan pemilihan Kepala Desa	2	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	2	Desa	2	Desa	100.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena terdapat peralatan (laptop) dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipelihara lagi.
- Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tidak terealisasi disebabkan karena jadwal pelaksanaan BIMTEK bertepatan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dalam keadaan sakit

Sedangkan Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Pelayanan administrasi kesekretariatan
- Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Kegiatan Pengadaan Penambahan Daya Listrik
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program Pelaporan Kinerja

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro
- Kegiatan Pembinaan BUMDesa
- Kegiatan Monitoring dan Identifikasi terhadap Sarana dan Prasarana Desa

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Kegiatan Workshop peningkatan kapasitas aparaturnya dalam pelaksanaan pengelolaan swadaya dan gotong royong

6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- Kegiatan Pelayanan administrasi kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Dasa Wisma
- Kegiatan rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai
- Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (POKJA I)
- Kegiatan Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu (POKJA II)
- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Jahit menjahit (POKJA II)
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pekarangan yang kreatif dan berinovasi (Pangan) (POKJA III)
- Kegiatan Pembinaan Perawatan Jenazah (POKJA I)

7. Program Pendorongan Swadaya masyarakat dalam menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi

- Kegiatan pembinaan Kader Posyandu
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil, melahirkan, Menyusui, Anak Balita dan Prasekolah
- Kegiatan Sosialisasi Penyakit Menular (TB-HIV) dan Pencegahan penyakit Tidak Menular

8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTT

- Kegiatan Pembinaan Posyantek

9. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Rakernis Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
- Kegiatan Penyusunan Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa
- Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Kegiatan Evaluasi rancangan Peraturan Desa
- Kegiatan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025

Faktor-faktor penyebab terpecahnya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kebijakan/tindakan perencanaan / penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu dalam merencanakan suatu kegiatan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat, sesuai dengan tupoksi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP 06 thn 2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa/kelurahan (%)			46,25	47,50	48,75	50,00	46,25	46,25	48,75	50,00	
2	Persentase LSM Aktif			18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	
3	Rata-rata jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)			1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	
4	Persentase LPM Berprestasi			3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	
5	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Cakupan Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat			29,55 %	34,54 %	37,04 %	40,04 %	29,55 %	1,76 %	37,04 %	40,04 %	
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	
8	PKK Aktif			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Posyandu Aktif			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Jumlah Pemerintahan Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya			67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Sinjai mencapai target sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga Posyantek dan Wartek
13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga Posyantek dan Wartek.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan :

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang :

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembar 1 dari 12

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	432.234.871	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	432.234.871	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	26.097.421	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	26.097.421	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	R4 : 2 Unit, R2 : 14 unit	3.465.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	R4 : 2 Unit, R2 : 14 unit	3.465.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5.501.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5.501.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Stop Kontak : 10 Buah, Kabel : 40 Meter, Lampu TL : 60 Buah, Isolasi : 5 Buah, Baterai : 10 Biji.	7.363.950	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Stop Kontak : 10 Buah, Kabel : 40 Meter, Lampu TL : 60 Buah, Isolasi : 5 Buah, Baterai : 10 Biji.	7.363.950	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4.774.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Sinjai Utara	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4.774.000	
	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Waktu pelayanan administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	145.233.500	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Waktu pelayanan administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	145.233.500	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	12 Bulan	118.000.000	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	12 Bulan	118.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	107 Kali	128.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	107 Kali	128.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	557.407.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	557.407.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan	Roda 4 : 1 Unit;	300.500.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan	Roda 4 : 1 Unit; Roda 2 : 2 Unit	300.500.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Lemari arsip (Gantung) : 5 unit, AC : 11 unit	86.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Lemari arsip (Gantung) : 5 unit, AC : 11 unit	86.000.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Printer : 2 Unit	4.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Printer : 2 Unit	4.000.000	
	Pengadaan mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis mebeleur yang diadakan	Kursi Kerja : 13 Buah, Meja Kerja : 11	92.500.000	Pengadaan mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis mebeleur yang diadakan	Kursi Kerja : 13 Buah, Meja Kerja : 11	92.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit Gedung	15.492.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit Gedung	15.492.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit Roda Empat; 14 Unit Roda Dua	35.405.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit Roda Empat; 14 Unit Roda Dua	35.405.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	AC : 6 Unit, Mesin Rumput : 1 Unit	3.680.000	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	AC : 6 Unit, Mesin Rumput : 1 Unit	3.680.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Komputer : 9 unit, Laptop/ Notebook : 13 unit, Printer : 11 Unit	19.830.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Komputer : 9 unit, Laptop/ Notebook : 13 unit, Printer : 11 Unit	19.830.000	
	Peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	22.800.000	Peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	22.800.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	30 Pasang	13.800.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	30 Pasang	13.800.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Pasang	9.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Pasang	9.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	61.600.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	61.600.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	61.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	61.600.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	66.000.000	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	66.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	5.500.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	5.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	87 Dokumen	60.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	87 Dokumen	60.500.000	
	Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan yang disusun	12 Laporan	10.000.000	Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan yang disusun	12 Laporan	10.000.000	
	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	398.269.000	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	398.269.000	
	Pembinaan Pokjanal Posyandu	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pokjanal Posyandu yg dibina	9 Pokjanal Kec.	300.000.000	Pembinaan Pokjanal Posyandu	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pokjanal Posyandu yg dibina	9 Pokjanal Kec.	300.000.000	
	Pembinaan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan	Kab. Sinjai	Jumlah Pokja Posyandu Desa/Kelurahan	80 Orang	20.000.000	Pembinaan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan	Kab. Sinjai	Jumlah Pokja Posyandu Desa/Kelurahan	80 Orang	20.000.000	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia	Kab. Sinjai	Jumlah Lansia yang mengikuti Bimbingan Teknis	80 Orang	25.000.000						

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Posyandu terintegrasi	Kab. Sinjai	Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba	9 Posyandu	25.000.000						
	Penyusunan Regulasi Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kab. Sinjai	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Peraturan Bupati	40.000.000	Penyusunan Regulasi Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kab. Sinjai	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Peraturan Bupati	40.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kab. Sinjai	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	80 LPM	20.000.000	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kab. Sinjai	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	80 LPM	20.000.000	
	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kab. Sinjai	Jumlah BKAD yang dibina	8 BKAD	46.656.000	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kab. Sinjai	Jumlah BKAD yang dibina	8 BKAD	46.656.000	
	Penyusunan Regulasi Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Peraturan Bupati	30.000.000	Penyusunan Regulasi Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Peraturan Bupati	30.000.000	
	Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan		Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi	80 Desa / Kelurahan	23.000.000	Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan		Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi	80 Desa / Kelurahan	23.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rakernis Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Anggota Pokja Profil Desa/Kelurahan yang mengikuti Rakernis	80 Desa/ Kelurahan	23.000.000						
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%	190.117.000	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%	190.117.000	
	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yg dikembangkan	21 LKM	73.040.000	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan	13 LKM	30.000.000	
	Pelatihan Pengelola BUMDesa	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih	50 Orang	85.000.000	Pelatihan Pengelola BUMDesa	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih	67 Orang	85.000.000	
	Pembinaan BUMDesa	Kab. Sinjai	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	70.000.000	Pembinaan BUMDesa	Kab. Sinjai	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	70.000.000	
	Identifikasi BUMDesa Berprestasi	Kab. Sinjai	Jumlah BUMDesa yang diidentifikasi	8 BUMDesa	32.077.000	Identifikasi BUMDesa Berprestasi	Kab. Sinjai	Jumlah BUMDesa yang diidentifikasi	8 BUMDesa	32.077.000	
						Monitoring dan Identifikasi terhadap sarana dan Prasarana Desa	8 Kec.	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi	67 Desa	45.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	23%	30.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	23%	30.000.000	
	Workshop Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sinjai	Jumlah Aparat yang mengikuti Workshop	80 Orang	35.000.000	Workshop Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sinjai	Jumlah Aparat yang mengikuti Workshop	80 Orang	35.000.000	
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	9 Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	67 Desa; 13 Kelurahan	30.000.000	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sinjai	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	67 Desa; 13 Kelurahan	30.000.000	
	Peningkatan peran perempuan di pedesaan		Cakupan Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	100%	795.467.500	Peningkatan peran perempuan di pedesaan		Cakupan Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	100%	795.467.500	
	Pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK Kab. Sinjai	9 Kecamatan	Jumlah Pengurus PKK Kabupaten yang dilantik	9 Tim Penggerak PKK Kec.	75.000.000	Pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK Kab. Sinjai	9 Kecamatan	Jumlah Pengurus PKK Kabupaten yang dilantik	9 Tim Penggerak PKK Kec.	75.000.000	
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Sinjai Utara	Waktu Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	12 Bulan	295.000.000	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Sinjai Utara	Waktu Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	12 Bulan	295.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)	1 Keg.	57.000.000	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)	1 Keg.	57.000.000	
	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	9 Kecamatan	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibangun	9 Kelompok	40.000.000	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	9 Kecamatan	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibangun	9 Kelompok	40.000.000	
	Pembinaan Administrasi PKK	9 Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan yang dibangun	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	35.000.000	Pembinaan Administrasi PKK	9 Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan yang dibangun	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	35.000.000	
	Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	3 Kali	37.000.000	Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	3 Kali	37.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab. Sinjai	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di evaluasi Administrasinya	9 Kecamatan, 9 Desa/ Kelurahan	25.000.000	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab. Sinjai	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di evaluasi Administrasinya	9 Kecamatan, 9 Desa/ Kelurahan	25.000.000	
	Temu Koordinasi Kadarkum	Kab. Sinjai	Jumlah Peserta Temu Koordinasi Kadarkum	89 Orang	25.000.000	Temu Koordinasi Kadarkum	Kab. Sinjai	Jumlah Peserta Temu Koordinasi Kadarkum	89 Orang	25.000.000	
	Pembinaan Kelompok Kadarkum	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibangun	9 Kelompok	30.000.000	Pembinaan Kelompok Kadarkum	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibangun	9 Kelompok	30.000.000	
	Pembinaan Pola Asuh Anak dalam	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dibangun	90 Orang	25.000.000	Pembinaan Pola Asuh Anak dan	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dibangun	90 Orang	25.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	keluarga					Remaja dengan Penuh kasih sayang dalam keluarga					
						Pembinaan Keterampilan Kelompok Lansia	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	90 Orang	30.000.000	
	Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	80 Kelompok	25.000.000	Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	80 Kelompok	25.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan UP2K	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	9 Kelompok	30.000.000	Pembinaan dan Pengembangan UP2K	Kab. Sinjai	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	9 Kelompok	30.000.000	
	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit	80 Orang	60.000.000	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit	80 Orang	60.000.000	
	Pelatihan Keterampilan Tata Rias Wajah	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dilatih Tata Rias	80 Orang	60.000.000	Pelatihan Keterampilan Tata Rias Wajah	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dilatih Tata Rias	80 Orang	60.000.000	
						Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	9 Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina dalam pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	25.000.000	
						Pembinaan Rumah Sehat bagi Kader PKK	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang dibina dalam rumah sehat	80 Orang	25.000.000	
						Penyuluhan PHBS	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	80 Orang	25.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penyuluhan IVA Tes bagi Kader PKK	Kab. Sinjai	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan	80 Orang	30.000.000	
						Pembinaan Posyandu Terintegrasi	Kab. Sinjai	Jumlah Kader Posyandu yang dibina	80 Orang	25.000.000	
	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG		Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	2 Alat	199.000.000	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG		Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	2 Alat	199.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan SDA Terbarukan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pengelolaan SDA terbarukan yang dibina	1 Kelompok	46.000.000	Fasilitasi Pembinaan SDA Terbarukan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pengelolaan SDA terbarukan yang dibina	1 Kelompok	46.000.000	
	Pembinaan Posyantek	Kab. Sinjai	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek, 56 Wartek	92.500.000	Pembinaan Posyantek	Kab. Sinjai	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek, 56 Wartek	92.500.000	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	67 Kepala Desa	26.000.000	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	67 Kepala Desa	26.000.000	
	Bimbingan Teknis Aparat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	Kab. Sinjai	Jumlah Aparat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang dilatih	134 Orang	50.000.000						
	Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan		Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki data dan informasi	80 Desa/ Kelurahan		Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan		Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki data dan informasi	80 Desa/ Kelurahan	Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan	
	Rakernis Penyusunan Profil	Kab. Sinjai	Jumlah Anggota Pokja Profil	80 Desa/ Kelurahan	15.000.000						

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Desa/ Kelurahan		Desa/ Kelurahan yang mengikuti rakernis								
	Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa	67 Desa	286.320.500	Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa	67 Des	286.320.500	
	Evaluasi pengelolaan dan pelaporan Administrasi Aset Desa	Kab. Sinjai	Evaluasi pengelolaan dan pelaporan Administrasi Aset	67 Desa	38.166.000	Evaluasi pengelolaan dan pelaporan Administrasi Aset Desa	Kab. Sinjai	Evaluasi pengelolaan dan pelaporan Administrasi Aset	67 Desa	38.166.000	
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	80.000.000						
	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	38.166.000	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	38.166.000	
	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung, 2. Evaluasi Penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan	1. 2 x 8 Kecamatan 2. 67 Rekomendasi	38.166.000	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Kab. Sinjai	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung, 2. Evaluasi Penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa	3. 2 x 8 Kecamatan 4. 67 Rekomendasi	38.166.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintahan Desa								
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	67 Desa	374.992.000	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	67 Desa	374.992.000	
	Pembekalan Teknis dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa			54 Desa	850.000.000			1.		1.912.653.270	

Pada tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD setelah dianalisis, maka Hasil Analisis Kebutuhan tidak mengalami perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tabel dibawah ini terdapat beberapa usulan pemangku kepentingan hasil musrenbang kecamatan yang nantinya akan dimasukkan dalam program kerja Perangkat Daerah tahun depan.

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Sinjai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembinaan Kadarkum	Kabupaten	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dilatih	13 Desa/ Kel. Kec. Sinjai Timur, 11 Desa/ Kelurahan Kec. Sinjai Selatan	
2	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten	Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi bimbingan	Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah; 11 Desa/ Kelurahan Kec. Sinjai Selatan	Sesuai dengan rancangan awal Renja
3	Pelatihan Pengelola BUMDesa	Kabupaten	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih	7 Desa Kec. Sinjai Borong; 11 Desa/ Kelurahan Kec. Sinjai Selatan; Kec. Bulupoddo	
4	Pelatihan Pemutakhiran Data Profil Desa/kelurahan	Kabupaten	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki Data Profil Desa/Kelurahan	11 Desa/ Kelurahan Kec. Sinjai Selatan	
5	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Kec. Sinjai Selatan	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Yang dibina	11 Desa/ Kelurahan Kec. Sinjai Selatan	
6	Pelatihan Jahit	Kabupaten	Jumlah Anggota	Kec. Pulau	

	menjahit		PKK yang dilatih	Sembilan	
7	Sosialisasi PHBS	Kabupaten	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	Desa Lembang Lohe	
8	Pelatihan Masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kabupaten		Desa Lembang Lohe, Desa Massaile, Desa Bua	

Dari hasil rekapitulasi dari para pemangku kepentingan / hasil musrenbang kecamatan ada beberapa kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetapi kegiatan akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan pada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, Pada RKP 2021 terdapat 5 Prioritas Nasional, yaitu :

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Prioritas Nasional 3: Nilai Tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mendukung destinasi wisata serta penerapan dan pengembangan desa digital
	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melalui pendampingan transformasi ekonomi kampung terpadu untuk mengentaskan kemiskinan
	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa melalui pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa, pengembangan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes, pendampingan desa, pengendalian penggunaan dana desa, dan upaya konvergensi pencegahan stunting di desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan melalui peningkatan kapasitas BUMDes Bersama
	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dalam membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan kelurahan.

TABEL 5
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula	Target Kinerja Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan		Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa berstatus Swasembada, Swakarya dan Swadaya menurut Data Profil Desa dan Kelurahan	48,75
		Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa / Kelurahan		

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan program terkait adalah :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Uraian program dan kegiatan
- Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 mencakup 4 (Empat) program yaitu program rutin/pendukung dan program utama dan 10 (Sepuluh) Kegiatan serta 29 (sembilan) Sub kegiatan.

Program Utama

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan keberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dengan kegiatan :

- Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa
- Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa terdiri dari sub kegiatan :
- Sub kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
- Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Program Pendukung

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa, dengan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai.
- Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya menyebar pada 9 kecamatan, adapula Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Kelompok Masyarakat atau kelompok sasaran kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang menjadikan kelompok masyarakat/lembaga masyarakat sebagai sasaran seperti Tim Penggerak PKK,serta Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan, maka disusunlah rencana program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimana program tersebut diwujudkan dalam kegiatan belanja langsung dan tidak langsung yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai, dengan Jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.5.914.895.599,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).**

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Sinjai

Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5,914,895,599			4,687,093,275				
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,148,864,619			3,288,339,369				
2	13	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29,167,600			62,801,500				
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Cakupan pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	6 Dokumen	100%	27,725,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	29,167,600
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Cakupan pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	1 Dokumen	100%	1,442,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	1,442,600
2	13	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,830,488,859			2,830,488,859				
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	2,734,029,019	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	2,734,029,019

2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	39,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	39,820,000
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	13 Laporan	100%	56,639,840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	56,639,840
2	13	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,200,000			75,200,000	
2	13	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	5,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	5,200,000
2	13	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	7 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	5,200,000
2	13	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								150,027,980			150,027,980	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu pemenuhan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	3,550,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	3,550,400
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	8,462,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	8,462,500
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	12,655,280	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	12,655,280

2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	12,871,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	12,871,200
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	7,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	7,920,000
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	5,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	5,250,000
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	99,318,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	99,318,600
2	13	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14,159,150				50,000,000
2	13	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	1 Unit	100%	14,159,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	50,000,000
2	13	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,491,280				75,491,280
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	12 Bulan	100%	64,691,280	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	64,691,280

2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	3 Orang	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	10,800,000
2	13	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,329,750			44,329,750	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	15 Unit	100%	20,606,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	20,606,900
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kelurahan	100%	44 Unit	100%	12,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	12,900,000
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara rutin/berkala	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	2 Gedung	100%	8,382,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	8,382,850
2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100%	16 Unit	100%	2,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	2,440,000
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								38,670,700			45,250,000	
2	13	3	2		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								38,670,700			45,250,000	
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam satu kawasan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.23%	35 Desa	3 Dokumen	38,670,700	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Kerjasama Desa	52%	45,250,000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa/kelurahan (%).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program / kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,148,864,619
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,167,600
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,725,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,442,600
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,830,488,859
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,734,029,019
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,820,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56,639,840
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,200,000
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,200,000.00

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,027,980
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,550,400
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,462,500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,655,280
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,871,200
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,920,000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5,250,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,318,600
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,159,150
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,159,150
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,491,280
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,691,280.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,800,000.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,329,750
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,606,900
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,900,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,382,850
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,440,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	38,670,700
Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa	38,670,700
Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	38,670,700
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,980,531,180
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,980,531,180
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	950,528,780
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	57,053,100
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	35,584,800
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	837,506,000
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	13,053,600
Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	86,804,900
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	746,829,100
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	746,829,100
Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	746,829,100
	5,914,895,599.00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan yaitu tahun 2021 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini diharapkan program dan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, untuk itu sebelum memulai kegiatan diharapkan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Penjabaran dimaksud akan dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sinjai,

2020



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sinjai

Drs. YUHADI SAMAD, M. Si